

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- An-Na'im, Toward an Islamic reformation: Civil liberties, human rights, and international law. Syracuse University Press, Syracuse 1990.
- Asshiddiqie, J. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Asshiddiqie, J. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- Asshiddiqie, J. Hukum dan Teori Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press. 2014.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2016.
- Dicey, A. V. Introduction to the study of the law of the constitution. London: Macmillan. 1959.
- Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Aspek-aspek hukum pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Hasse J, Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pascasarjana UGM, JogJakarta, 2004.
- Human Rights Watch, Indonesia: End Impunity for Past Abductions, HRW, New York, 2023.
- J. Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Parati Politik dan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Krisna Harahap, HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia, Grafiti, Bandung, 2003.
- Madja El Muhtaj, Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia Mengurangi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Mahfud, M. D, Demokrasi dan tantangannya di era global, Pustaka, Jakarta, 2009.

- Muladi. Hak asasi manusia: Politik, hukum, dan implementasinya di Indonesia. Semarang: UNDIP Press. 2005
- Muladi. Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Semarang: UNDIP Press. 2010
- Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007.
- R. K. M. Smith, Textbook on International Human Rights , Oxford University Press, Oxford, 2018.
- Rahardjo Satjipto, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980.
- Rahardjo, S. Hukum dan masyarakat. Bandung: Angkasa. 2000.
- Rahardjo, S. Membedah hukum progresif. Jakarta: Kompas. 2008.
- Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta, 2003
- Satjipto Rahardjo. Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Satjipto Rahardjo. Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Jakarta: Kompas. 2008.
- Soekanto, Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan umum, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (suatu Tujuan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Steiner, International human rights in context: Law, politics, morals, Edisi Kedua, Oxford University Press, Oxford, 2000.
- Suratman, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Tahir Azhary, Negara Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Takdir, Mengenal Hukum Pidana, Edisi pertama, Ctk. Pertama, Laskar Perubahan, Jakarta, 2013.
- Wiratraman, R. H. P., Kebebasan berekspresi di Indonesia: Hukum, dinamika, masalah, dan tantangannya, Elsam ,2016.

JURNAL

- Aliansi Jurnalis Independen (AJI). (2025). Laporan kekerasan terhadap jurnalis. Jakarta: AJI Indonesia. 2025
- Amnesty International. Digital repression and freedom of speech in Indonesia. London: Amnesty International. 2023.
- Amnesty International. Indonesia: Police brutality in peaceful protest. London: Amnesty International. 2023.
- Amnesty International. Indonesia: Accountability gap for police violence. London: Amnesty International. 2024.
- Atqiya. “Kewarganegaraan dan hak asasi manusia: Perspektif hukum nasional dan hukum Islam”. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Edisi No. 2, No. 1, 2025.
- E. Kusuma, “Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” Sanskara Hukum dan HAM 1, Edisi No. 3, 2023.
- E. Kusuma “Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” Sanskara Hukum dan HAM 1, Edisi No. 3, 2023.
- Harahap, S. B, “Tinjauan hukum tentang kebebasan berpendapat dari aspek hukum positif dan hukum Islam (Studi kasus Bima Lampung)”. Unes Law Review, Edisi No. 6, Vol. 2, 2023.
- Harjun Rouf, "Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Era Digital" Jurnal Hukum dan Demokrasi, Edisi No. 2 Vol. 5, 2023.
- Husni, F. “Kebebasan berekspresi dan hak konstitusional warga negara perspektif siyâsah dustûriyyah”, IJTIHAD, Edisi No. 37, Vol.1, 2021.
- Human Rights Watch. Impunity in Indonesia’s security forces. New York: HRW. 2024.
- Human Rights Watch. Police reform in Indonesia: The missing link. New York: HRW. 2024.
- Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Laporan Tahunan 2024.
- J. Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Edisi No. 3, Cornell University Press, Ithaca.
- John W, Johnson.2001. “Peran Media Bebas”. Demokrasi. Office of International Information Programs U.S. Departement of State. 2001.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Laporan keuangan negara 2024. Jakarta: Kemenkeu. 2024.
- Komnas HAM. Laporan tahunan 2024. Jakarta: Komnas HAM. 2024.
- Komnas HAM. Laporan penyelidikan awal aksi demonstrasi 25–31 Agustus 2025. Jakarta: Komnas HAM. 2025.
- Komnas HAM, Laporan Penyelidikan Kasus Penghilangan Paksa 1997–1998, Komnas HAM, Jakarta, 2006.
- Komnas HAM, Laporan Penyelidikan Kasus Penghilangan Paksa 1997–1998.
- Kompolnas. Laporan kinerja 2024. Jakarta: Kompolnas. 2024
- KontraS. Catatan akhir tahun 2024: Kekerasan aparat dan lemahnya akuntabilitas. Jakarta: KontraS. 2025.
- KontraS, Catatan Akhir Tahun 2024, KontraS, Jakarta, 2025.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Laporan tahunan perlindungan korban kekerasan negara 2024. Jakarta: LPSK. 2024.
- Lubis, “Hambatan Penegakan Hukum terhadap Aparat: Imunitas dan Institusional”, Jurnal Hukum & Peradilan, Edisi No. 6 Vol. 1, 2015.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023). Evaluasi penanganan laporan kekerasan aparat. Jakarta: Ombudsman RI.
- Rizki Wahyuni, R., dkk. (2023). Evaluasi kinerja lembaga pengawas HAM di Indonesia. Jurnal Hukum dan HAM, 5(2), 48–58.
- Rothstein, B. (2011). The quality of government: Corruption, social trust, and inequality. Chicago: University of Chicago Press.
- R. Wahyuni, “Hak Asasi Manusia pada Kebebasan Berpendapat dalam Negara Demokrasi di Indonesia,” Doktrina: Journal of Law 7, Edisi No. 1, 2024.
- Soekarno, “Tantangan penanganan penghilangan paksa dalam perspektif hukum Indonesia” Jurnal HAM & Demokrasi, Edisi No. 4 Vol. 1, 2019.
- Solihin, L, “Membentuk warga negara yang demokratis: Konstruksi literasi kewargaan dalam mata pelajaran PPKn”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Edisi No.4, Vol.2, 2021.
- Sri Rahayu Wilujeng, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis”, Jurnal Humanika, Edisi No. 2 Vol. 18, 2013.

- Theo van Boven, Study on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8.
- V. D. P. Dewi, “Kebebasan Berpendapat dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Media Sosial,” Jurnal Hukum dan HAM Digital 4, Edisi No. 1, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009

Rome Statute of the International Criminal Court

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (3).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (OHCHR)

United Nations, Universal Declaration of Human Rights, 1948

United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights

United Nations, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

United Nations, Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.

United Nations, International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

United Nations, International Covenant on Civil and Political

LAMAN INTERNET

Usut tuntas pelanggaran HAM dalam demo mahasiswa September 2019, terdapat dalam <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-tuntas-pelanggaran-ham-dalam-demo-mahasiswa-september> diakses terakhir pada 25 September 2025

Lubang hitam pelanggaran HAM, terdapat dalam <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/lubang-hitam-pelanggaran-ham-kekerasan-polisi-terhadap-unjuk-rasa-peringatandarurat> diakses terakhir pada 25 September 2025

Mereka Tidak Hilang, Mereka Dihilangkan Paksa!: Pemetaan Praktik Penghilangan Orang secara Paksa dalam Aksi 25-31 Agustus 2025, terdapat dalam <https://kontras.org/artikel/mereka-tidak-hilang-mereka-dihilangkan-paksa-pemetaan-praktik-penghilangan-orang-secara-paksa-dalam-aksi-25-31-agustus-2025> diakses terakhir pada 25 September 2025.

Siaran Pers Sikap Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Aksi Demonstrasi di Berbagai Daerah di Indonesia dan Penanganannya, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-sikap-lembaga-nasional-hak-asasi-manusia-terhadap-aksi-demonstrasi-di-berbagai-daerah-di-indonesia-dan-penanganannya> diakses terakhir pada 25 September 2025

Pernyataan Sikap Bersama Masyarakat Sipil: Darurat Kekerasan Negara: Menuntut Tanggung Jawab Presiden, DPR, dan Kapolri!, terdapat dalam <https://ti.or.id/ Pernyataan-sikap-bersama-masyarakat-sipil-darurat-kekerasan-negara-menuntut-tanggung-jawab-presiden-dpr-dan-kapolri> diakses terakhir pada 25 September 2025.

Brutalisme Polisi Semakin Ancam Ruang Kebebasan Berpendapat Masyarakat, terdapat dalam <https://pshk.or.id/publikasi/brutalisme-polisi-semakin-ancam-ruang-kebebasan-berpendapat-masyarakat> diakses terakhir pada 25 September 2025.

Siaran Pers Sikap Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Aksi Demonstrasi di Berbagai Daerah di Indonesia dan Penanganannya, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-sikap-lembaga-nasional-hak-asasi-manusia-terhadap-aksi-demonstrasi-di-berbagai-daerah-di-indonesia-dan-penanganannya>

[lembaga-nasional-hak-asasi-manusia-terhadap-aksi-demonstrasi-di-berbagai-daerah-di-indonesia-dan-penanganannya](#) diakses terakhir pada 25 September 2025

Mereka Tidak Hilang, Mereka Dihilangkan Paksa!: Pemetaan Praktik Penghilangan Orang secara Paksa dalam Aksi 25-31 Agustus 2025, terdapat dalam <https://kontras.org/artikel/mereka-tidak-hilang-mereka-dihilangkan-paksa-pemetaan-praktik-penghilangan-orang-secara-paksa-dalam-aksi-25-31-agustus-2025> diakses terakhir pada 25 September 2025.

Apa itu kekerasan polisi, terdapat dalam <https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/apa-itu-kekerasan-polisi> Diakses terakhir pada 25 September 2025.

Pengertian demonstrasi, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/demonstrasi> diakses terakhir pada 25 September 2025.

Pengertian demonstrasi, terdapat dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7554343/apa-itu-demonstrasi-ini-pengertian-tujuan-aturan-dan-contohnya-di-indonesia> diakses terakhir pada 25 September 2025